



KPU REPUBLIK INDONESIA

PPID

LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2021



DAFTAR ISI

GAMBARAN UMUM	4
SARANA DAN PRASARANA	6
ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	8
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI & GRAFIK	10
SENGKETA INFORMASI PUBLIK	18
KENDALA	20
RENCANA TINDAK LANJUT	22



GAMBARAN UMUM

Pelayanan Informasi Publik
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia



Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU terus menjadi prioritas KPU dalam rangka perwujudan visi KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL. Keterbukaan informasi pada setiap tahapan pemilihan, yang sudah dirintis KPU pada Pemilu 2014 dan mendapatkan banyak apresiasi, menjadi pengalaman berharga dan terus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan.

Keterbukaan informasi publik pada kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2021 menjadi komitmen KPU untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang transparan semakin menguat. Tidak hanya pada informasi kelembagaan, informasi terkait kelembagaan memiliki makna yang tidak kalah penting karena menjadi bukti akuntabilitas dan profesionalitas kinerja KPU secara kelembagaan.

Akses publik dalam memperoleh informasi tidak luput menjadi perhatian. Pembentukan ruang pelayanan, walau belum secara maksimal

dilakukan, terus diupayakan. Aplikasi Android PPID Komisi Pemilihan Umum dan Website ppid.kpu.go.id yang memfasilitasi pelayanan informasi secara online telah aktif digunakan oleh pemohon informasi dari seluruh Indonesia.

Tugas KPU RI dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik nyatanya tidak hanya seputar pelaksanaan dalam “rumah” sendiri. Tugas berat untuk melakukan “ketuk tular” paham keterbukaan informasi berikut implementasinya kepada 34 KPU Provinsi/ KIP Aceh dan 514 KPU/ KIP Kabupaten/Kota menjadi amanah besar bagi KPU RI.

Serangkaian kegiatan pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota sejak Tahun 2015 telah mulai dirintis dan membuahkan hasil yang cukup positif.

Penghargaan keterbukaan informasi yang diraih oleh PPID KPU RI dan beberapa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjadi apresiasi yang membanggakan bagi seluruh jajaran KPU di seluruh Indonesia sekaligus sebagai pemacu semangat untuk terus mewujudkan kualitas pengelolaan dan keterbukaan informasi publik yang lebih baik lagi.



**SARANA &
PRASARANA**

Untuk mempermudah pemohon informasi, KPU telah menyediakan beberapa akses permohonan, sebagai berikut :

LAYANAN LANGSUNG



Desk Pelayanan Informasi di lantai 1
Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat.

Waktu operasional
Senin s.d Kamis (09.00 – 15.00 WIB)
dan Jumat (09.00 – 15.30).



SURAT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat.



TELEPON

(021) 31937223 ext (237) dan
(021) 31902573.



EMAIL

ppid@kpu.go.id



WEBSITE

ppid.kpu.go.id



APLIKASI ANDROID GOOGLEPLAYSTORE

PPID Komisi Pemilihan Umum



CHAT VIA WHATSAPP

+62 812-9411-2929



**ANGGARAN &
SUMBER DAYA
MANUSIA**

ANGGARAN

Kegiatan Pembentukan dan Penguatan PPID melalui program rakor evaluasi PPID di Lingkungan KPU dan Bimtek pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdapat pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat kegiatan Pembentukan PPID Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Total anggaran kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 379.677.000,-

SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik merupakan tanggung jawab seluruh komponen dalam KPU RI sebagaimana diatur melalui Keputusan KPU No. 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

NO	STRUKTUR PPID	JABATAN
1	Pembina	Ketua dan Anggota KPU RI
2	Tim Pertimbangan	1. Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih 2. Sekretaris Jenderal 3. Deputi Bidang Dukungan Teknis 4. Deputi Bidang Administrasi 5. Inspektur Utama
3	Atasan PPID	Sekretaris Jenderal KPU RI
4	PPID	Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5	Tim Penghubung	Pejabat yang ditetapkan pada masing – masing biro/inspektorat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
6	Desk Pelayanan	Kepala Bagian pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

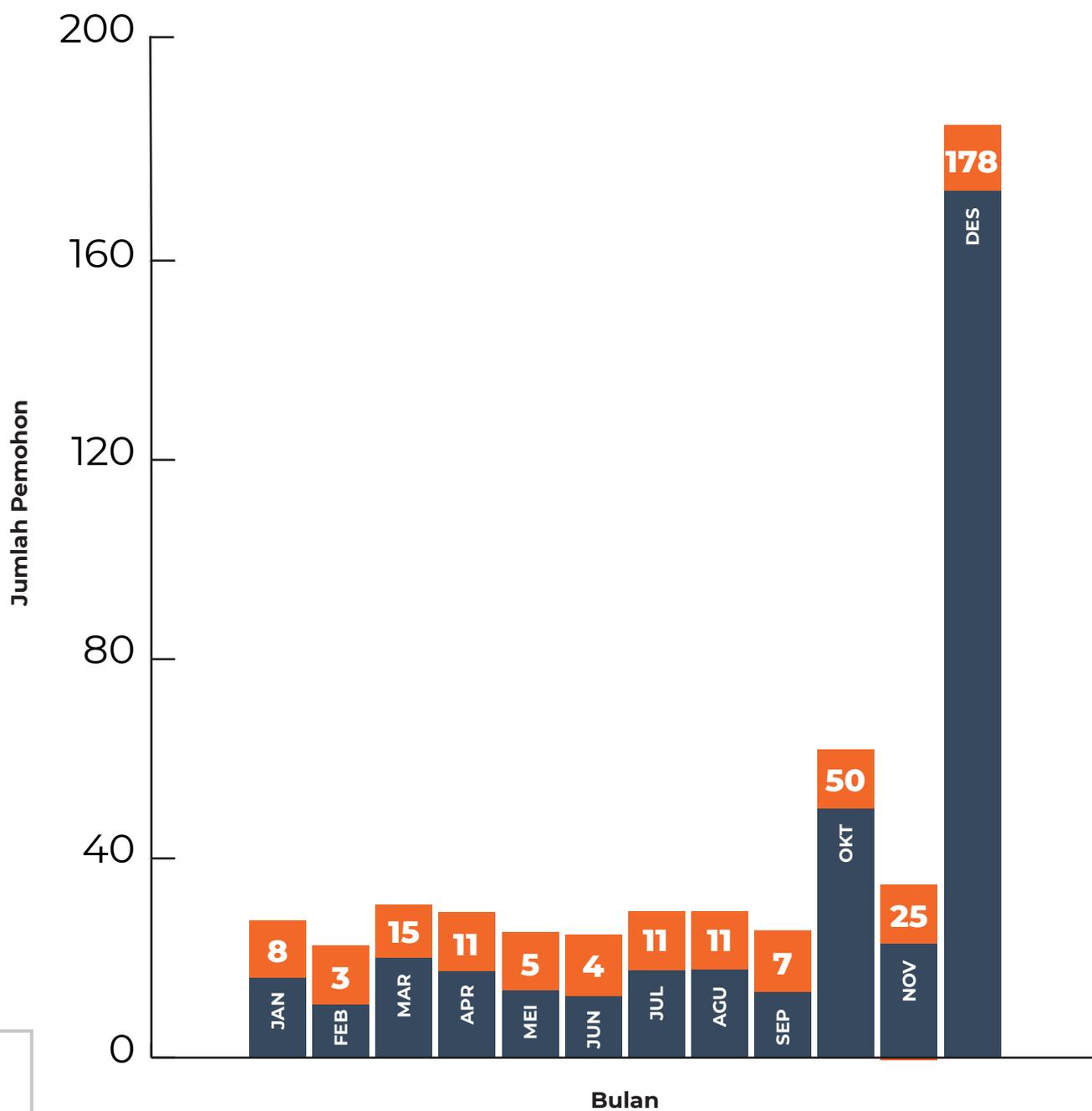
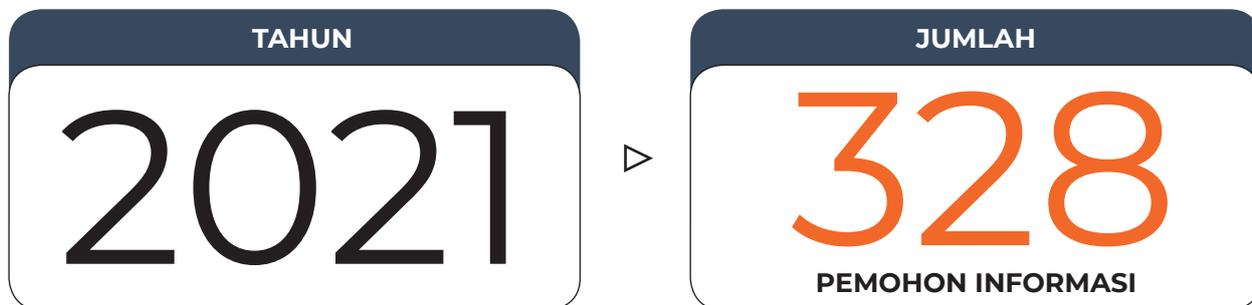
A large, curved, orange shape that starts from the top left and curves towards the bottom right, creating a dynamic background for the text.

**RINCIAN
PELAYANAN
INFORMASI &
GRAFIK**

JUMLAH PEMOHON INFORMASI

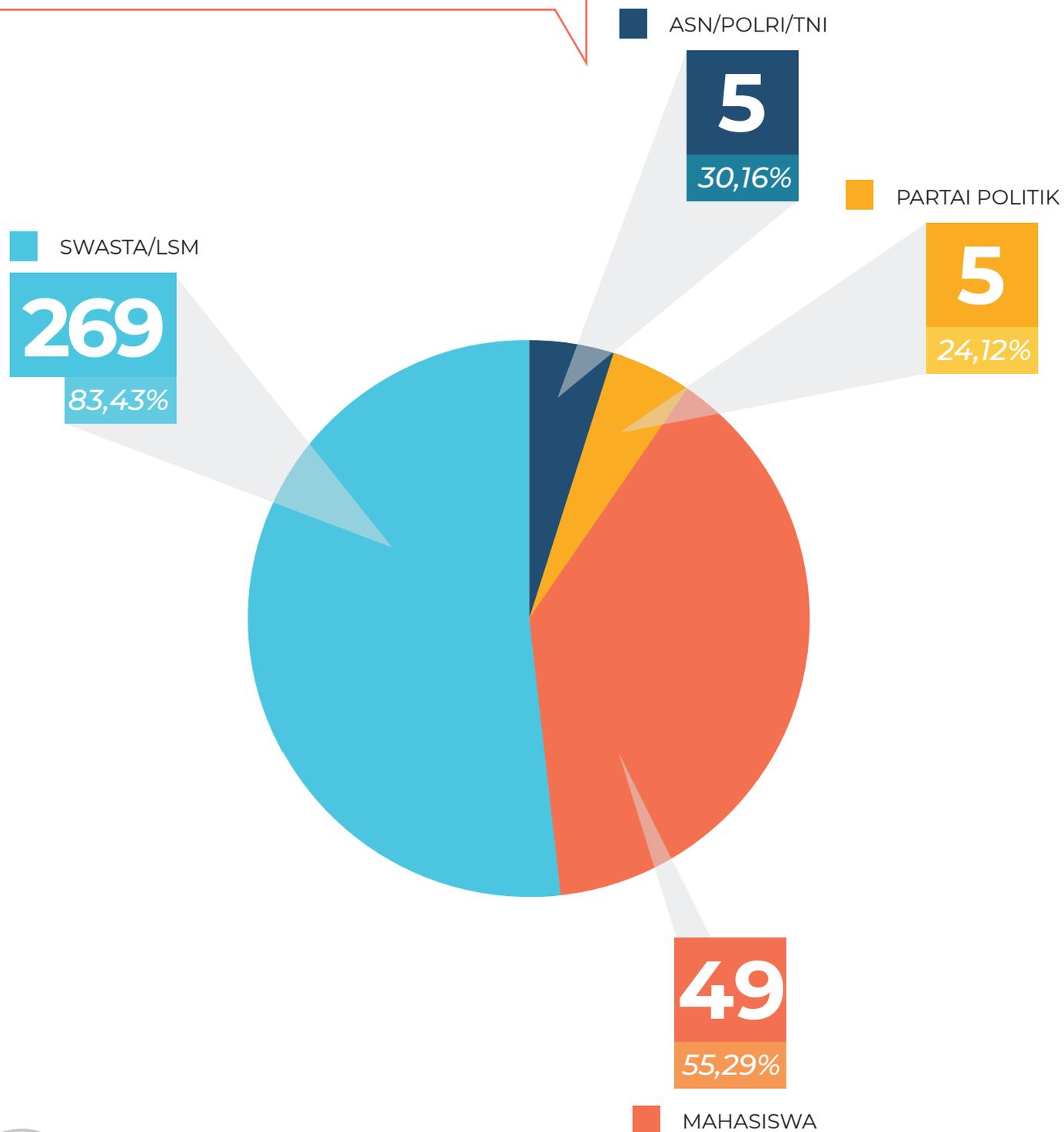
Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU RI dapat dilakukan melalui 2 (dua) sarana, yaitu:

1. desk pelayanan
2. secara *online* melalui aplikasi *ppid.kpu.go.id*.



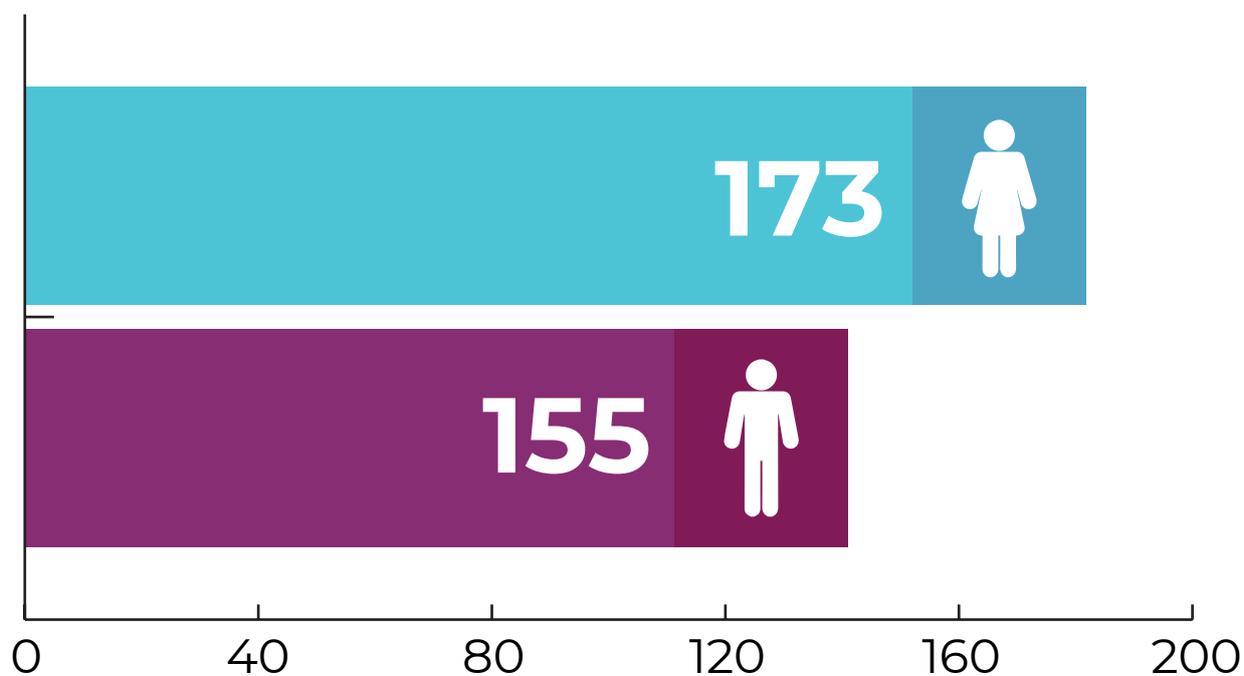
LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK
PPID KPU RI TAHUN 2021
BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN



LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK
PPID KPU RI TAHUN 2021
BERDASARKAN JENIS KELAMIN



Keterangan warna:

PEREMPUAN

LAKI LAKI

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN JENIS INFORMASI

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK
PPID KPU RI TAHUN 2021
BERDASARKAN JENIS INFORMASI PUBLIK

263
PEMOHON

24
PEMOHON

HASIL PEMILU/
PILKADA

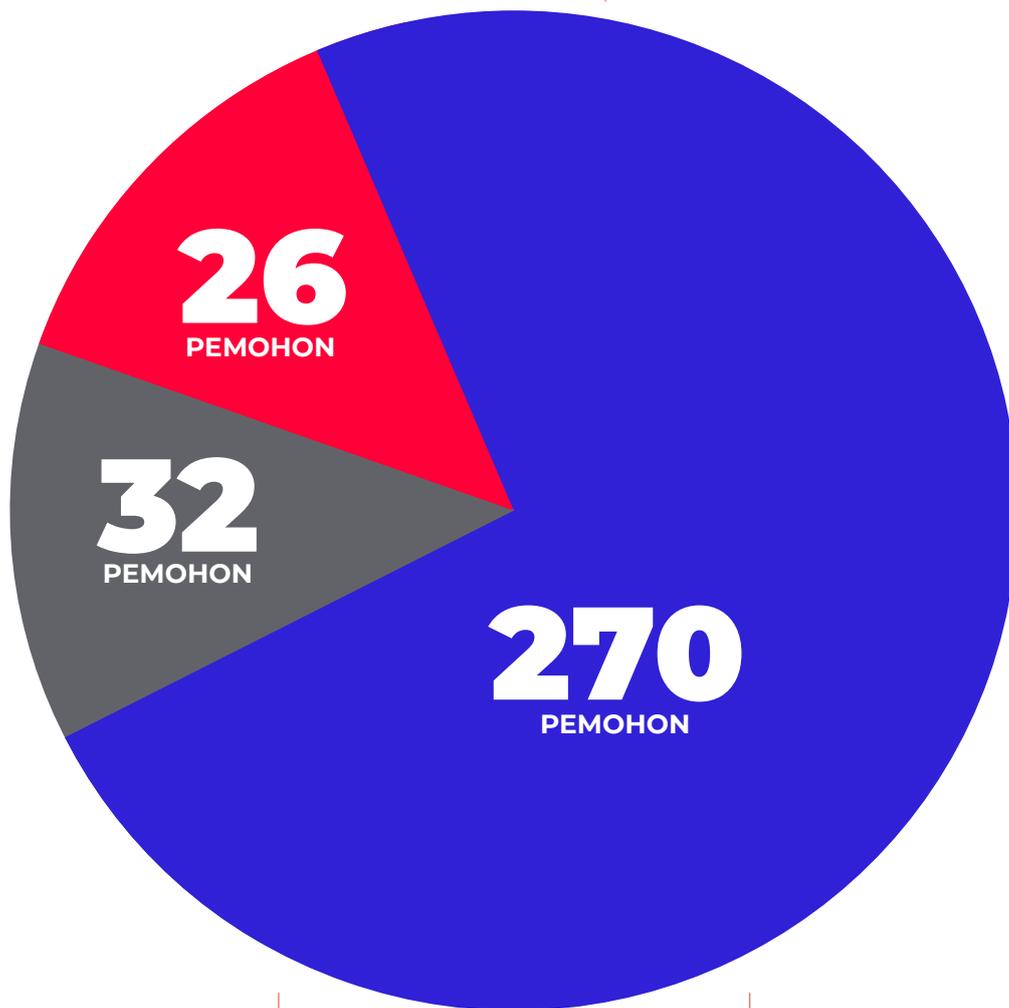
INFORMASI
KELEMBAGAAN

INFORMASI
KEPEMILUAN

41
PEMOHON

WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI

WAKTU YANG DIPERLUKAN OLEH PPID KPU RI
DALAM MELAYANI PEMOHON INFORMASI:
1 HARI : 26 PEMOHON
2-7 HARI : 270 PEMOHON
>7 HARI : 32 PEMOHON



PERMOHONAN DATA
1 HARI

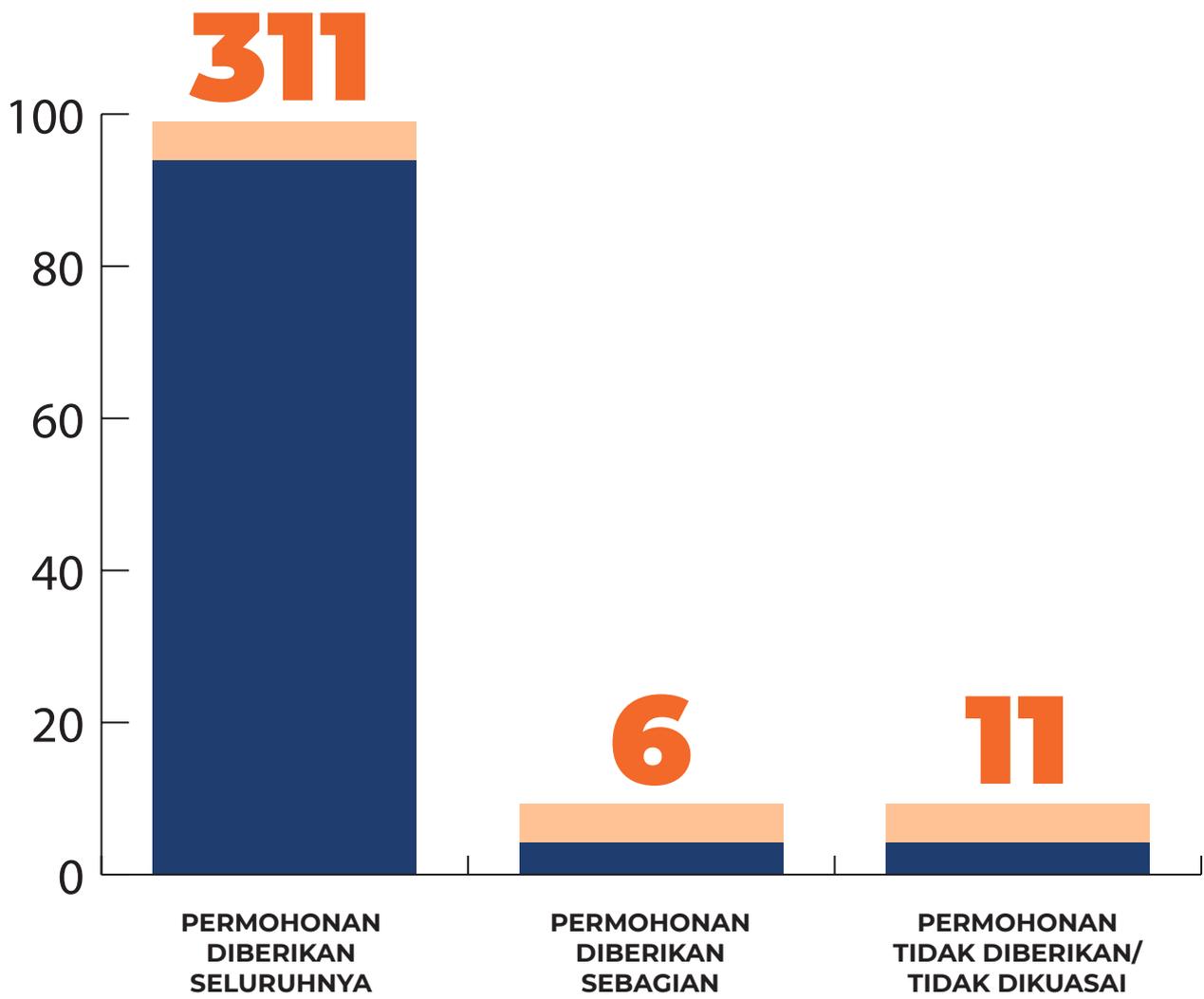


PERMOHONAN DATA
2-7 HARI



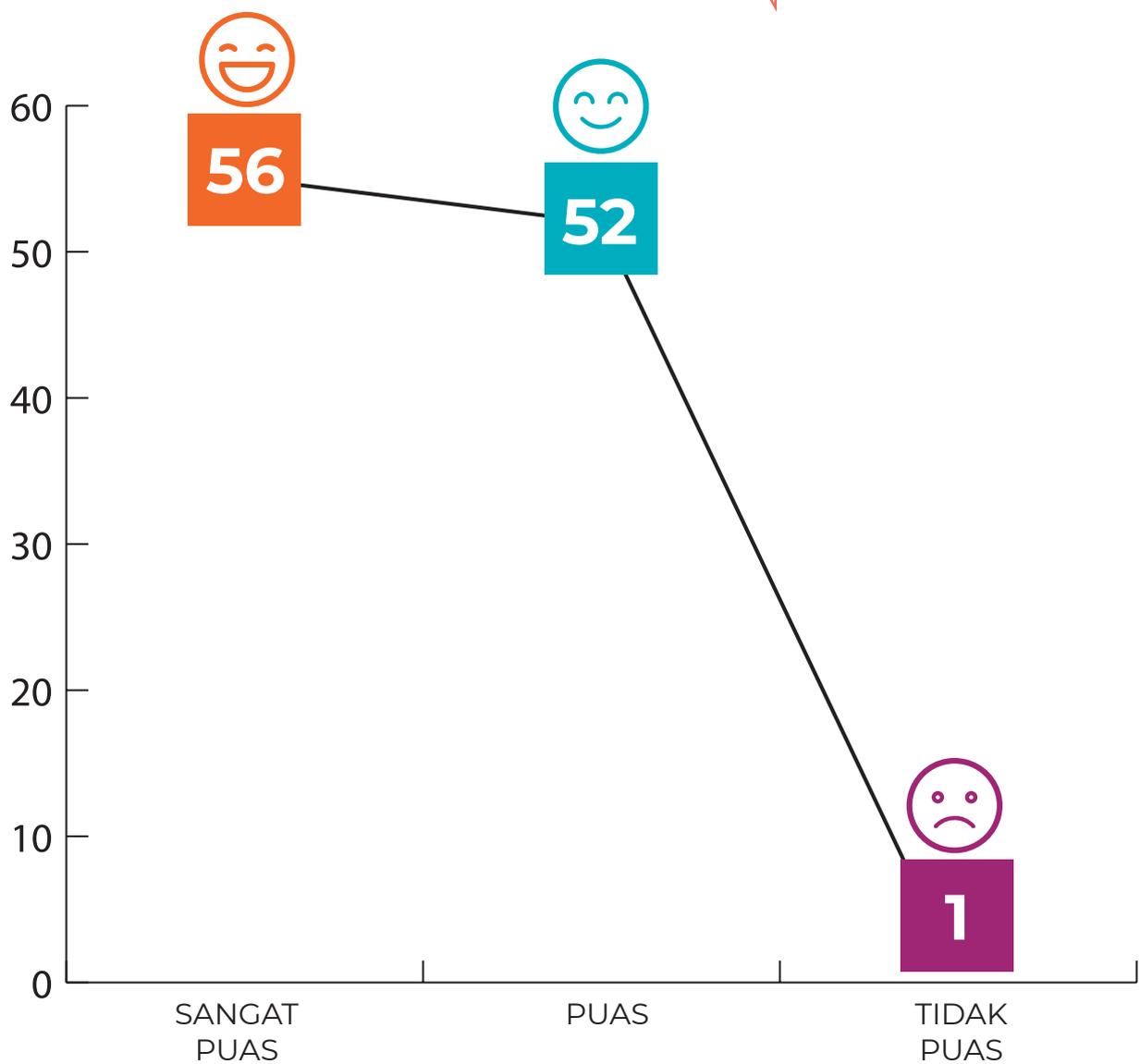
PERMOHONAN DATA
>7 HARI

**JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
YANG DIBERIKAN SELURUHNYA, DIBERIKAN SEBAGIAN DAN TIDAK
DIBERIKAN/TIDAK DIKUASAI**



PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN KEPUASAN PEMOHON INFORMASI

JUMLAH PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID KPU RI TAHUN 2021
BERDASARKAN KEPUASAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK





**SENGKETA
INFORMASI
PUBLIK**

Pada Tahun 2021 tidak ada sengketa Informasi Publik
dalam Pelayanan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik KPU RI

TAHUN

2021

SENGKETA

0



INOVASI DAN KOLABORASI



INOVASI KPU

DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



Pelayanan PPID Tatap Muka Langsung di Era Pandemi COVID-19



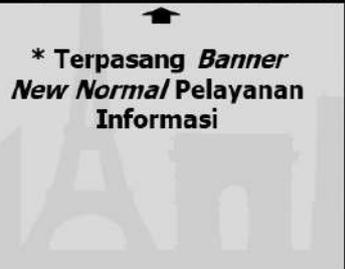
* Tersedia
Handsantizer di depan
pintu masuk ruangan
PPID KPU RI



* Terpasang
Sekat/Pembatas di
meja pelayanan
informasi



* Ruang Tunggu
PPID KPU RI yang
representatif



* Terpasang *Banner*
New Normal Pelayanan
Informasi



Pengembangan Website dan Aplikasi Mobile PPID



PELAYANAN & PERMOHONAN INFORMASI MELALUI APLIKASI DALAM JARINGAN

Peraturan KPU No.1 Tahun 2015

Optimalisasi tampilan akan mempermudah pemohon informasi dalam mencari informasi/memohon informasi (*user friendly*)

Penambahan fitur-fitur baru dibuat untuk memudahkan publik mengakomodir permohonan informasi ke PPID KPU



Katalog Informasi



KATALOG INFORMASI

Dahulu

Katalog informasi hanya berisikan daftar isi apa saja informasi yang berada dalam laman e-PPID dan belum terkoneksi dengan data/link sehingga belum informatif

Saat Ini

Katalog informasi saat ini telah diklasifikasikan secara lebih detail untuk mempermudah dan mempercepat mencari data yang diinginkan oleh pengguna dan telah dikoneksikan dengan sumber informasinya dalam bentuk link aktif terkait kelembagaan KPU dan informasi kepelituan



Dahulu

Agenda informasi tidak ada dalam website e-PPID

Saat Ini

Agenda informasi hadir untuk memberikan informasi terkait jadwal kegiatan kehumasan dan PPID KPU RI

E-PPID telah Terkoneksi dengan Open Data KPU

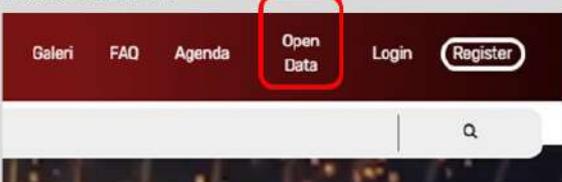
Dahulu

Sudah terkoneksi dengan Website ppid tapi data hanya dapat dibaca saja dalam format pdf

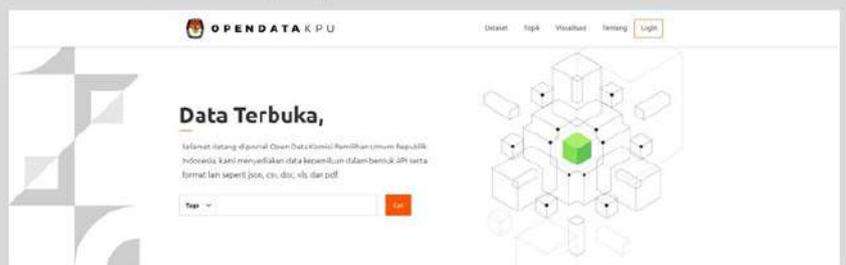
Saat ini

Data sudah dapat diolah langsung oleh publik melalui halaman API (*Application Programming Interface*), dan terjamin perlindungannya data pribadi

Website PPID



Website opendata.kpu.go.id



Dalam mewujudkan good government, salah satu langkah yang diambil KPU adalah Open Data, yaitu pemberian akses data dalam format yang mudah digunakan oleh pemangku kepentingan (Pemerintah & Masyarakat).

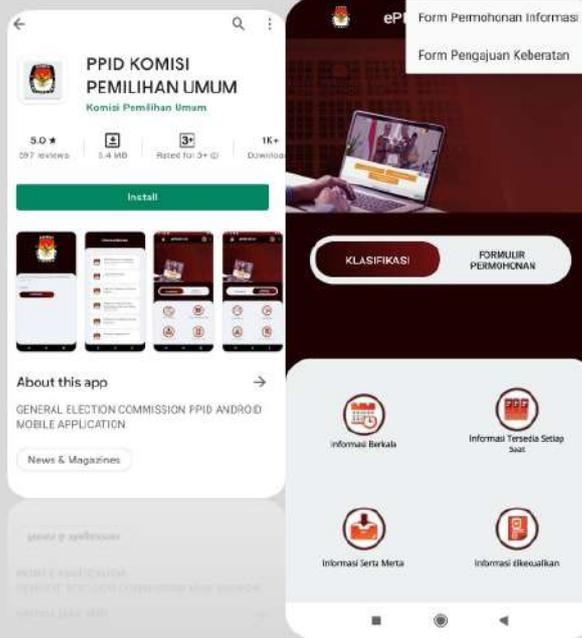
Manfaat

- Transparansi
- Akuntabilitas
- Inovasi terbaru
- Meningkatkan Partisipasi Publik
- Meningkatkan Kepercayaan Publik
- Efisiensi Layanan Pemerintah
- Efektifitas Layanan Pemerintah

Dahulu

Layanan PPID Mobile sebelumnya tidak bisa mengajukan permohonan informasi dan pengajuan keberatan. Sebelumnya permohonan informasi hanya bisa dilakukan di web PPID KPU RI saja.

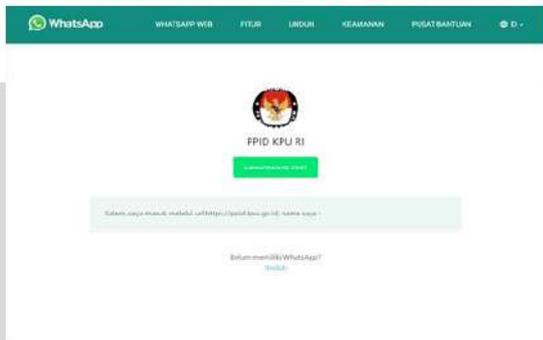
Belum melakukan pengembangan produk di Appstore hanya tersedia di Playstore



Saat Ini

Layanan PPID Mobile saat ini telah mengalami pengembangan dan pembaharuan fitur dengan bisa mengajukan form permohonan informasi dan form pengajuan keberatan secara langsung melalui aplikasi

Telah dalam proses pengembangan produk dan fitur-fitur terbaru agar aplikasi PPID Mobile tersedia di Appstore



Dahulu

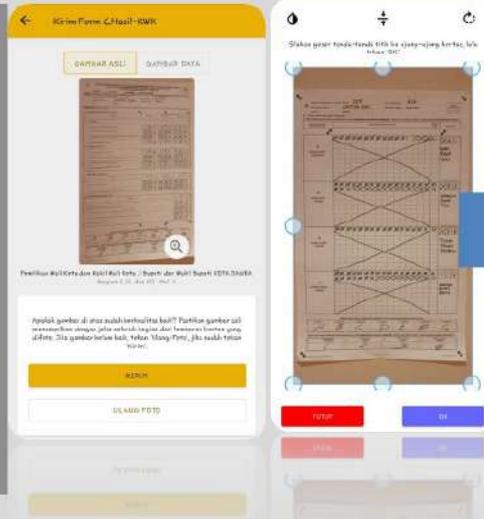
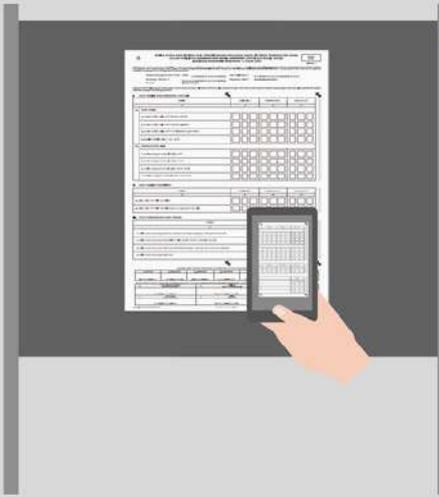
Layanan via Whatsapp sebelumnya hanya dapat dilayani di hari kerja dan meski telah ada di laman PPID-KPU RI

Saat Ini

Layanan via whatsapp saat ini bisa terkoneksi via chat Whatsapp dan tetap dilayani meski hari libur



Inovasi Kepemiluan Aplikasi dan Website Sirekap



DIKONVERSI MENJADI ANGKA

1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	117	105	222
2. Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPA) yang menggunakan hak pilihnya	0	0	0
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	1	2	3
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	118	107	225

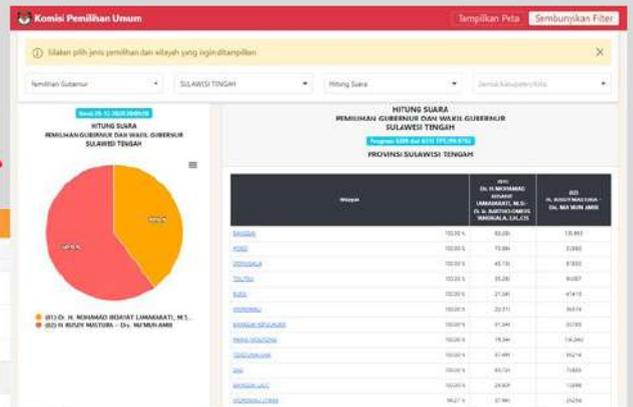
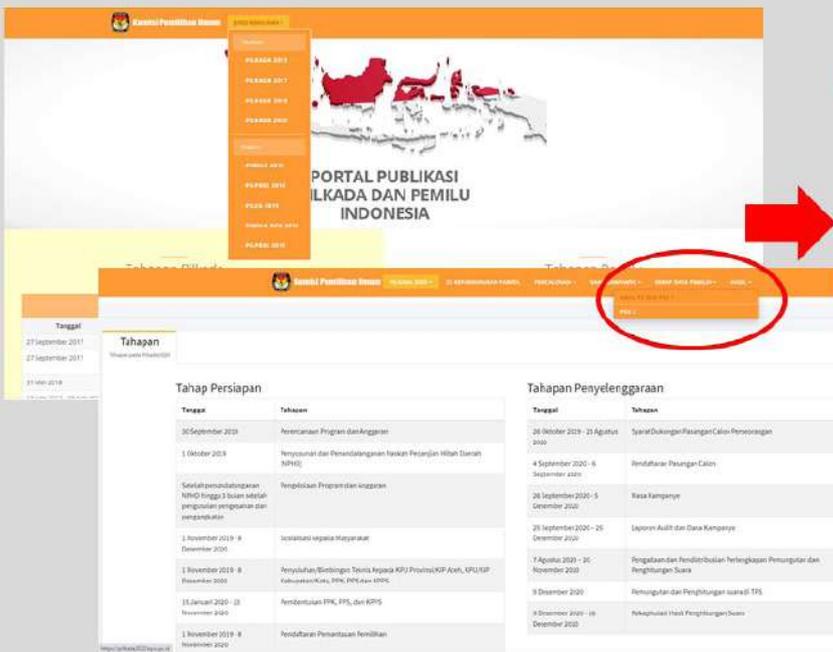
II. DATA PEMILIH DISABILITAS			
	L	P	L+P
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	2	0	2
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	2	0	2

III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT (2-3+4)	304
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	1
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpaka, termasuk sisa surat suara cadangan	77
4. Jumlah surat suara yang digunakan	228

Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut SIREKAP adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai instrumen dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara cepat, akurat dan transparan. Hasil SIREKAP dapat dilihat di laman infopemilu.kpu.go.id



Penyebaran Informasi Hasil Pemilu/Pemilihan di Laman infopemilu.kpu.go.id



Informasi hasil pemilu dan pemilihan tersedia di laman infopemilu.kpu.go.id untuk pengguna secara lengkap dan transparan



KOLABORASI KPU DENGAN BADAN PUBLIK LAINNYA DALAM RANGKA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

.....



Kolaborasi Data KPU Untuk Program Prioritas Nasional



NOTA KESEPAHAMAN TENTANG KERJA SAMA DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)



NOTA KESEPAHAMAN TENTANG DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

KPU terus melakukan pembaruan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara berkelanjutan bersama pemangku kepentingan dan data DPT milik KPU RI ini digunakan oleh Kementerian Kesehatan untuk program vaksin nasional dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk program bantuan produktif usaha mikro yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19



Beberapa Kolaborasi dengan Instansi Lain



Para Pihak	Nota Kesepahaman
TNI	Bantuan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya serta Pertukaran Data dan Informasi dalam Pemilu dan Pemilihan
BSSN	Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik (Kerjasama pemanfaatan sertifikat elektronik, pengamanan teknologi informasi dan komunikasi)
Garuda Indonesia	Pemanfaatan Produk dan Layanan dalam Penyelenggaraan Pemilu & Pemilihan (Kerjasama Angkutan Udara. Layanan Kargo dan Kerjasama Lainnya)
KPK	Kerjasama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pertukaran Informasi dan Data, Diklat dan Penerapan Sertifikasi)
Asosiasi Media Siber Indonesia	Pelaksanaan Cek Fakta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota
Bawaslu & Kominfo	Pengawasan Konten Internet dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota



Transparansi Informasi Keuangan Melalui Media Massa



Keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan di KPU yang bisa didownload melalui website kpu.go.id. Laporan keuangan KPU RI yang telah di audit ini dipublikasikan pula melalui **media massa cetak** dan juga media sosial sebagai bukti transparansi publik dilakukan oleh KPU RI

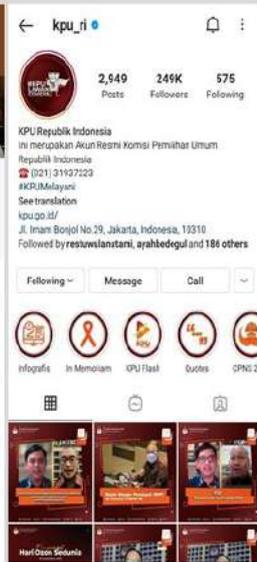
Perubahan Tampilan Media Sosial Dengan Pengelompokan Konten

Penyebarluasan informasi pemilihan dan kelembagaan KPU menggunakan laman resmi KPU-RI dan media sosial KPU-RI.

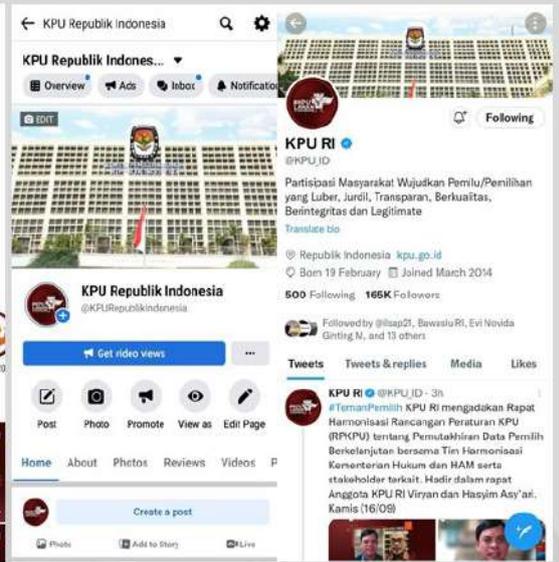
Di Tahun 2021 media sosial KPU-RI telah diikuti 574.423 akun dan telah memposting 3.500 konten.



Tampilan Youtube KPU RI



Tampilan Instagram KPU RI



Tampilan Facebook KPU RI

Tampilan Twitter KPU RI

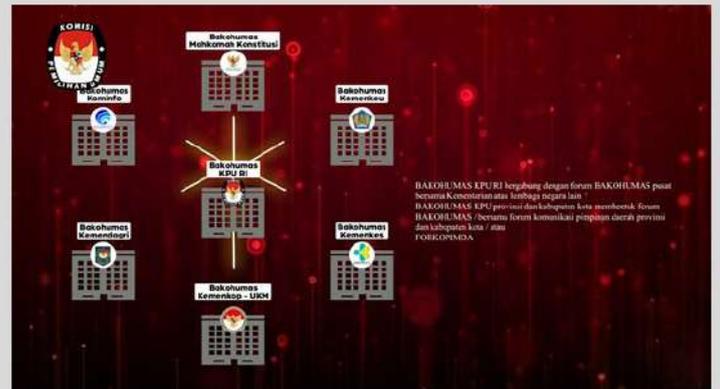
Inovasi Diseminasi Informasi Melalui BAKOHUMAS KPU

Penyebarluasan Informasi Melalui BAKOHUMAS KPU Se-Indonesia

Penyebarluasan Informasi Melalui BAKOHUMAS di Tingkat Pusat



Konten disebarluaskan ke akun resmi 34 Provinsi



Bakohumas
KPU RI

Bakohumas KPU
Provinsi/KIP
Aceh
(34 satuan kerja)

Bakohumas
KPU/KIP
Kabupaten/Kota
(514 satuan kerja)

- BAKOHUMAS KPU RI bergabung dengan forum BAKOHUMAS pusat bersama Kementerian atau Lembaga Negara lain.
- BAKOHUMAS KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk forum BAKOHUMAS bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atau FORKOPIMDA.



WEBSITE KPU.GO.ID



**Laman KPU
Telah Diakses
270 ribu Pengunjung
Setiap Bulannya**

Data per 20 Agustus 2021,
total konten informasi di
laman kpu.go.id

6.704 konten terdiri dari :

- Berita terkini **3152**
- Berita daerah **2911**
- Pengumuman : **467**

MEDIA SOSIAL



**Media Sosial KPU
hingga saat ini telah diikuti
574 ribu Akun dari
3.500an Postingan Konten**

Eksposure media sosial KPU RI
meningkat **60,5** persen

Diukur dari jumlah postingan
konten dari tahun 2020
dibandingkan dengan tahun 2021



Informasi Kelembagaan

SIPP KPU

(Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu)

SIMONIKA KPU

(Sistem Informasi Monitoring Keuangan)

LPSE KPU

(Layanan Pengadaan Secara Elektronik)

JDIH KPU

(Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)

DUMAS KPU

(Pengaduan Masyarakat)

Informasi Kepemiluan

SIDALIH

(Sistem Informasi Data Pemilu)

SIPOL

(Sistem Informasi Partai Politik)

SILON

(Sistem Informasi Pencalonan)

SIDAKAM

(Sistem Pelaporan Dana Kampanye)

SILOG

(Sistem Informasi Logistik)

SITUNG

(Sistem Informasi Penghitungan Suara)

SIREKAP

(Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Suara)

INFOPEMILU.KPU.GO.ID

(Portal Publikasi Pilkada & Pemilu Indonesia)



**Dukungan
beragam website
& aplikasi terkait
informasi
kepemiluan dan
kelembagaan**



Klik Video

INOVASI PPID KPU RI TAHUN 2021



Klik Video

KOLABORASI PPID KPU RI TAHUN 2021



KENDALA

PROSES PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
DI KPU MENGALAMI KENDALA, ANTARA LAIN :

- 1** Sarana dan prasarana yang tersedia pada Desk Pelayanan belum optimal padahal itu menjadi salah satu unsur penilaian (20%);

- 2** Aplikasi ppid.kpu.go.id sebagai sarana mempermudah akses permohonan informasi masih sering mengalami gangguan teknis;

- 3** Data dan informasi yang seharusnya bersifat terbuka belum seluruhnya terdokumentasikan dengan baik;

- 4** Tersedia Tenaga pendukung namun mungkin kuantitasnya yang masih kurang.

- 5** Penguasa informasi belum lengkap memberikan list informasi yang dikuasai, sehingga mempersulit dalam proses pengelompokan informasi, termasuk proses uji konsekuensi untuk menetapkan informasi yang dikecualikan



**RENCANA
TINDAK
LANJUT**

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas KPU. Untuk mendukung hal tersebut, KPU menyiapkan serangkaian rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1 Pengembangan e-PPID KPU RI sebagai upaya meningkatkan kemudahan pelayanan permohonan informasi , dengan mempermudah akses permohonan informasi jelang Tahapan Pemilu 2024

2 Perluasan akses Pelayanan Informasi PPID KPU RI Mobile dalam basis Android dan IOS untuk semakin memudahkan Pemohon Informasi mengakses informasi ke pemilu.

3 Melakukan penyesuaian terhadap Peraturan KPU No 1 Tahun 2015 tentang PPID, disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2019 dan PERKI Nomor 1 Tahun 2021 serta Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang SOTK KPU.

4 Melakukan sosialisasi Peraturan KPU tentang PPID yang telah disesuaikan (sebagaimana pon 3 di atas) kepada PPID KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

5 Peningkatkan kualitas pengelolaan PPID KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota melalui giat pelatihan, khususnya dalam menghadapi Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

6 Memperkuat proteksi system jaringan/ server KPU RI agar semakin baik dan menjadi rujukan utama para pemohon informasi.

7 Peningkatan Inventarisir Informasi Yang Dikecualikan

8 Membuat program inovasi dalam pelayanan informasi kelembagaan dan ke pemilu yang semakin cepat, update dan transparan.

9 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan informasi.



PPID

KPU REPUBLIK INDONESIA

**INFORMASI
ADALAH
HAK ANDA.**

www.ppid.kpu.go.id